

KATEGORI

Sosial

SUB KATEGORI

Kemiskinan

NAMA INDIKATOR

Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota

TAHUN

2017

KONSEP

- **Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota** adalah banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan yang dirinci berdasarkan wilayah kabupaten/kota.
- **Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota** adalah banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan yang dirinci berdasarkan wilayah kabupaten/kota.
- **Penduduk Miskin** adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.
- Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
- Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)
- Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

RUJUKAN

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- *Undang-Undang* 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan Dan Permukiman
- Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

RUMUS

-

WALI DATA

BPS Kabupaten Pematang

UKURAN

Orang

UNIT

Seksi Statistik Sosial

KEGUNAAN

Mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah secara umum

INTERPRETASI

Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk diwilayah tersebut rendah. Sedangkan persentase penduduk miskin yang rendah menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk diwilayah tersebut adalah tinggi.

KETERANGAN

-

SUMBER

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

METODOLOGI

- Metode pemilihan sampel dalam studi ini dilakukan dalam 6 tahap. Pada tahap pertama dipilih 7 propinsi secara purposive (sengaja) namun dapat mewakili wilayah barat dan timur Indonesia, serta wilayah urban dan rural. Ketujuh propinsi tersebut adalah Sumatera Selatan, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur (mewakili wilayah barat), Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan (mewakili wilayah timur). Tahap kedua adalah memilih 2 kabupaten/kota dari masing-masing propinsi kecuali DKI Jakarta 3 kota secara purposive. Dari masing-masing kabupaten/kota, dipilih sampel 2 kecamatan secara purposive. Sampai dengan tahap ketiga, pemilihan sampelnya dilakukan BPS Pusat.
- Selanjutnya tahap keempat, yaitu pemilihan desa dilakukan oleh petugas BPS Propinsi dimana pada setiap kecamatan dipilih 2 desa. Tahap kelima adalah pemilihan 2 Rukun Tetangga (RT) pada setiap desa yang dilakukan oleh petugas lapangan (BPS Kabupaten/Kota) dengan pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat RT tersebut heterogen. Tahap terakhir (keenam) adalah pemilihan rumah tangga dimana pada setiap RT dipilih 30 rumah tangga dengan cara systematic sampling yang distratikan berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Pemilihan sampel rumah tangga didasarkan pada hasil pendaftaran rumah tangga di masing-masing RT. Perhitungan interval sampel dan pemilihan angka random pertama (R1) untuk pemilihan sampel rumah tangga dilakukan pada setiap RT terpilih.
- Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung (tatap muka) antara pencacah dengan responden dengan menggunakan kuesioner. Responden dari rumah tangga terpilih adalah kepala rumah tangga, suami/istri, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui secara persis karakteristik rumah tangga bersangkutan.

KEDALAMAN DATA

Provinsi

PERIODE

Semesteran, Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Badan Pusat Statistik

DOKUMEN

DDA

